



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Penguatan Kewargaan Inklusif melalui Perspektif Gender: Membangun Budaya Demokrasi dan Keadilan Sosial di Era Society 5.0

*Strengthening Inclusive Citizenship through a Gender Perspective: Building a
Culture of Democracy and Social Justice in the Era of Society 5.0*

Nama Penulis

Rahmi Oktaviani Pulungan
Ahmad Fauzan Siregar

Afiliasi Penulis

Universitas Jambi
Universitas Jambi

Email Koresponden Utama: rahmi.oktaviani@unja.ac.id

Abstrak

Makalah ini mengkaji penguatan kewargaan inklusif melalui perspektif gender sebagai upaya membangun budaya demokrasi dan keadilan sosial di era Society 5.0. Kewargaan yang inklusif menuntut pengakuan dan partisipasi setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender, sementara transformasi digital pada era Society 5.0 membuka ruang partisipasi baru sekaligus tantangan replikasi ketimpangan yang sudah ada. Melalui kajian konseptual dan tinjauan pustaka, artikel ini menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai kesetaraan gender, kontribusi kewargaan digital terhadap partisipasi inklusif, serta strategi memperkuat budaya demokrasi berkeadilan gender. Pembahasan meliputi peran pendidikan kewarganegaraan berperspektif gender, kewargaan digital sebagai ruang partisipasi inklusif, dan strategi penguatan budaya demokrasi berkeadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kewargaan inklusif berperspektif gender berkontribusi signifikan terhadap terciptanya budaya demokrasi yang partisipatif dan keadilan sosial yang lebih merata di era Society 5.0.

Kata kunci: kewargaan inklusif, perspektif gender, budaya demokrasi, keadilan sosial, Society 5.0

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

Abstract

This article examines the strengthening of inclusive citizenship through a gender perspective as an effort to build a culture of democracy and social justice in the Society 5.0 era. Inclusive citizenship demands equal recognition and participation for all citizens regardless of gender, while digital transformation in the Society 5.0 era opens new spaces for participation while also risking the replication of existing inequalities. Through a conceptual study and literature review, this article analyzes the role of civic education in internalizing gender-equality values, the contribution of digital citizenship to inclusive participation, and strategies for strengthening a gender-just democratic culture. The discussion covers the role of gender-responsive civic education, digital citizenship as a space for inclusive participation, and strategies for strengthening a socially just democratic culture. Findings indicate that strengthening gender-responsive inclusive citizenship contributes significantly to building a more participatory democratic culture and more equitable social justice in the Society 5.0 era.

Keywords: *inclusive citizenship, gender perspective, democratic culture, social justice, Society 5.0*

Pendahuluan

Kewargaan yang inklusif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang substantif, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kajian dalam Prosiding SeNSosio (2025) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis warga negara terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam ruang kebijakan dan politik, sehingga warga negara tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi juga subjek aktif yang memperjuangkan hak-hak politik yang setara tanpa diskriminasi gender.

Ketimpangan gender dalam ranah kewargaan tidak hanya termanifestasi dalam bentuk penolakan akses formal, tetapi juga melalui praktik sosial dan institusional yang bias. Isu Gender dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan (2024) menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih memproduksi ketimpangan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender yang hadir melalui praktik sosial, kebijakan

institusional, serta interaksi pembelajaran yang bias, sehingga penguatan kewargaan inklusif perlu dimulai dari transformasi praktik pendidikan itu sendiri.

Kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga turut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya kewargaan yang inklusif di ranah publik. Rahmawaty (2015) dalam kajian tentang harmoni keluarga perempuan karier menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga menjadi modal penting bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan percaya diri dalam ranah publik, karena dukungan keluarga yang setara memungkinkan perempuan mengembangkan kapasitas kewargaan secara optimal.

Transformasi digital pada era Society 5.0 turut memperluas ruang kewargaan melalui konsep kewargaan digital yang menuntut kecakapan baru dari setiap warga negara. Ribble (2015) mengonseptualisasikan kewargaan digital sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, mencakup unsur-unsur seperti akses digital, literasi digital, dan etika digital, yang kesemuanya perlu diinternalisasikan secara inklusif tanpa bias gender agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi setara di ruang digital.

Strategi kurikuler yang responsif gender menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kewargaan inklusif di berbagai jenjang pendidikan. Fradana, Sari, dan Alfira (2025) menunjukkan bahwa integrasi kurikulum yang responsif gender dan penguatan literasi digital menjadi strategi efektif dalam mendorong partisipasi perempuan yang lebih luas dalam berbagai ruang sosial, termasuk ruang kewargaan digital. Berdasarkan kelima pandangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana penguatan kewargaan inklusif melalui perspektif gender dapat membangun budaya demokrasi dan keadilan sosial di era Society 5.0, dengan pembahasan difokuskan pada peran pendidikan kewarganegaraan, kewargaan digital, dan strategi penguatan budaya demokrasi.

Pembahasan

1. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Berperspektif Gender

Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender sejak dini.

Kajian dalam Prosiding SeNSosio (2025) menegaskan bahwa integrasi perspektif gender dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi strategi efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya politik yang berkeadilan, sehingga peserta didik memahami kesetaraan gender bukan sebagai wacana abstrak, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik kewargaan sehari-hari.

Isu Gender dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan (2024) menambahkan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang responsif gender memerlukan penyediaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi, sehingga peserta didik perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas kewargaannya secara optimal.

2. Kewargaan Digital sebagai Ruang Partisipasi Inklusif

Era Society 5.0 menghadirkan ruang kewargaan baru melalui platform digital yang memungkinkan partisipasi warga negara secara lebih luas dan cepat. Ribble (2015) menjelaskan bahwa kewargaan digital mencakup sembilan unsur, termasuk akses digital, literasi digital, dan etika digital, yang kesemuanya perlu diwujudkan secara setara agar tidak terjadi replikasi ketimpangan gender yang sudah ada di ruang digital.

Fradana, Sari, dan Alfira (2025) menunjukkan bahwa penguatan literasi digital yang responsif gender menjadi strategi penting untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kecakapan yang setara dalam memanfaatkan ruang digital untuk berpartisipasi dalam wacana publik, advokasi kebijakan, dan pengembangan diri, sehingga kewargaan digital benar-benar inklusif bagi seluruh warga negara.

3. Kesetaraan dalam Keluarga sebagai Fondasi Kewargaan Inklusif

Kewargaan inklusif tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesetaraan yang dialami individu dalam ranah keluarga sebagai institusi sosial terkecil. Rahmawaty (2015) menunjukkan bahwa harmoni dan kesetaraan gender dalam keluarga

memberikan fondasi psikologis yang kuat bagi perempuan untuk berpartisipasi secara percaya diri dalam ranah publik, karena dukungan keluarga yang setara mengurangi beban ganda yang sering menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan kewargaan.

Dengan demikian, penguatan kewargaan inklusif perlu memperhatikan dimensi keluarga sebagai titik awal internalisasi nilai kesetaraan, sebelum individu berpartisipasi lebih luas dalam ranah sosial, politik, dan digital.

4. Strategi Penguatan Budaya Demokrasi Berkeadilan Sosial

Penguatan budaya demokrasi yang berkeadilan sosial memerlukan sinergi antara pendidikan kewarganegaraan yang responsif gender, penguatan kewargaan digital yang inklusif, serta dukungan kesetaraan dalam ranah keluarga. Sintesis dari pandangan Prosiding SeNSosio (2025), Isu Gender dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan (2024), Rahmawaty (2015), Ribble (2015), serta Fradana dkk. (2025) menegaskan bahwa kewargaan inklusif berperspektif gender merupakan fondasi penting bagi terciptanya budaya demokrasi yang partisipatif dan keadilan sosial yang merata di era Society 5.0.

Simpulan

Penguatan kewargaan inklusif melalui perspektif gender merupakan fondasi penting bagi terciptanya budaya demokrasi dan keadilan sosial di era Society 5.0, yang perlu dimulai dari internalisasi nilai kesetaraan melalui pendidikan kewarganegaraan, diperkuat melalui kesetaraan dalam ranah keluarga, dan diperluas melalui partisipasi yang setara di ruang kewargaan digital. Transformasi digital membuka peluang besar bagi partisipasi inklusif, namun juga berisiko mereplikasi ketimpangan gender yang sudah ada apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang responsif gender. Oleh karena itu, penguatan kewargaan inklusif perlu didorong secara sistemik melalui pendidikan, keluarga, dan kebijakan digital yang berkeadilan, agar budaya demokrasi Indonesia semakin partisipatif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender.

Referensi

- Fradana, A. F., Sari, C. K., & Alfira, N. (2025). Pendidikan inklusif untuk kesetaraan gender: Strategi pemberdayaan perempuan melalui kurikulum dan literasi digital. *Jurnal Pendidikan Dirgantara*, 2(2), 216–222. <https://doi.org/10.61132/jupendir.v2i2.298>
- Isu Gender dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Prosiding SeNSosio: Transformasi Kebijakan dan Politik Berbasis Gender: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Demokrasi. (2025). Seminar Nasional Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram.
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam keluarga perempuan karier: Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Palastren: *Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1–34.
- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know (3rd ed.). *International Society for Technology in Education*.